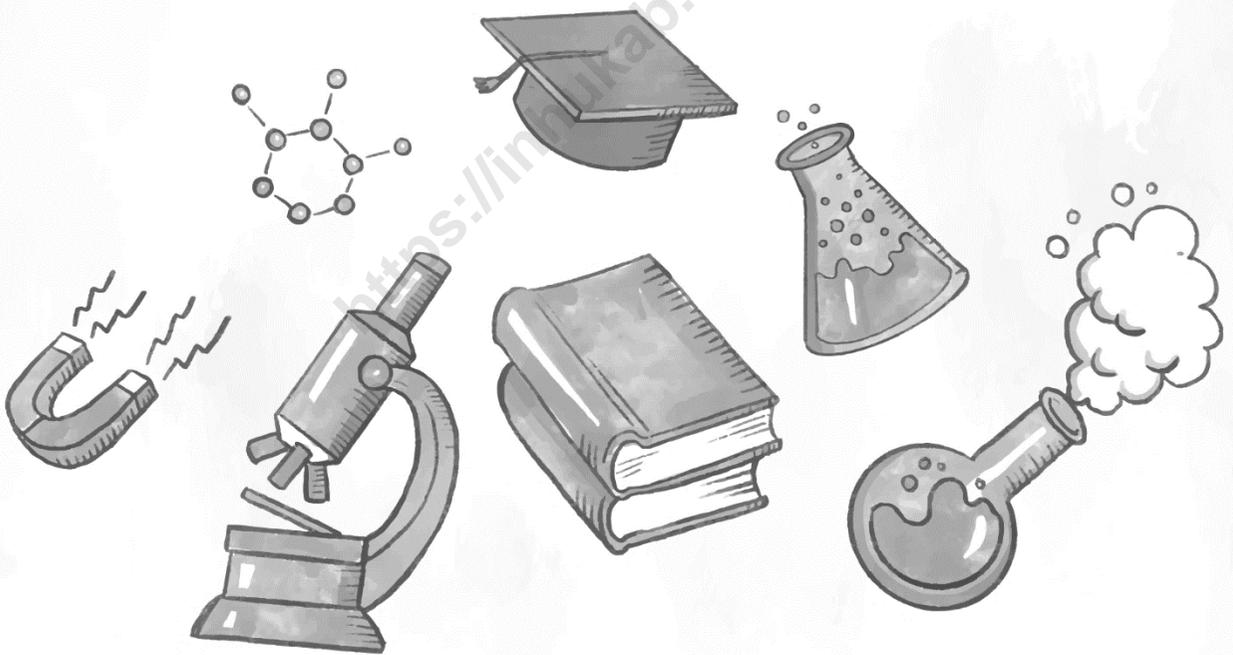


STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2021



STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2021



Statistik Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu 2021

ISBN. :
No. Publikasi : 14020.2224
Katalog : 4301002.1402
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 50 Halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Penyunting:

BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Dicetak oleh:

BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Sumber Ilustrasi

freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Penanggungjawab:

Sukarwanto, SST

Penyunting:

Mujahid Rasyid S.Si, M.I.Kom

Pemeriksa Tabel dan Grafik:

Mujahid Rasyid S.Si, M.I.Kom

Heny Suryani Wira, SST

Penulis:

Heny Suryani Wira, SST

Pengolah data:

Badan Pusat Statistik

Desain Kover:

Heny Suryani Wira, SST

Kata Pengantar

Pendidikan adalah proses terencana sebagai investasi masa depan, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan yang bermutu menjadi modal sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Statistik Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu 2021 memberikan gambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan hasil Susenas Maret 2021. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, dan sarana prasarana pendidikan.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang.

Rengat, 20 Desember 2022

Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu



SUKARWANTO, SST

Daftar Isi

Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
.....	x
Daftar Gambar	xi
.....	1
BAB 1.....	1
Pendahuluan	3
Pembangunan Pendidikan, Kini dan Nanti	4
Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pembangunan	5
Sistematika Penulisan	6
.....	9
BAB 2.....	9
Metodologi.....	11
Sumber Data	11
Konsep dan Definisi	11
BAB 3	15
.....	16
Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	17
Jumlah Sekolah dan Peserta Didik	17
Beban Kerja Pendidik.....	21
.....	25
BAB 4	25
.....	26
Partisipasi Sekolah	27
Partisipasi Sekolah	27
Angka Partipasi Sekolah.....	29

Angka Partisipasi Kasar	31
Angka Partisipasi Murni	33
BAB 5	37
.....	38
Hasil dan Capaian Proses Pendidikan	39
Angka Melek Huruf (AMH)	39
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	42
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	43
BAB 6	47
Hasil Penghitungan <i>Sampling Error</i>	49
Daftar Pustaka	51

<https://inhukab.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021	20
Tabel 2. Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, MA) dan Status Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021	20
Tabel 3. Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021	23
Tabel 4. Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, dan MA) dan Status Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021	23
Tabel 5. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021	28
Tabel 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2020-2021	30
Tabel 7. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021	32
Tabel 8. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021	33
Tabel 9. Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021	41
Tabel 10. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021.	41
Tabel 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021	43

Daftar Gambar

Gambar 1. Pertumbuhan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021.....	18
Gambar 2. Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun Ajaran 2020/2021	19
Gambar 3. Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun Ajaran 2020/2021.....	21
Gambar 4. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021... ..	22
Gambar 5. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021	34
Gambar 6. Angka Melek Huruf di Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Kelompok Umur 2019-2021.....	40
Gambar 7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2021	42
Gambar 8. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indragiri Hulu, 2019-2021.....	44

BAB

1

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tersebut dipertegas pada Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 kemudian menekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan di negara Indonesia.

Pendidikan, dalam pengertiannya yang paling luas, memainkan peran yang makin besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara manusia hidup dan bertindak. Pendidikan pun menjadi investasi masa depan, karena dengan pendidikan manusia mampu menyesuaikan cara berpikirnya mengembangkan segala potensi diri, dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan menjadi modal dalam mengantarkan negara dan masyarakat berinteraksi pada skala global menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Meskipun bukan jalan yang singkat untuk dapat dilalui namun merupakan salah satu bekal yang bisa diandalkan dan secara tidak langsung menjadi modal pembangunan bagi negara.

Pendidikan di Masa Pandemi

Sudah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak cukup fatal terhadap implementasi pembelajaran. Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, Pemerintah Indonesia telah menginstruksikan sekolah maupun perguruan tinggi untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan di masing-masing satuan pendidikan sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada satuan pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan beberapa kebijakan terkait proses belajar mengajar peserta didik, penilaian dan

penentuan kelulusan, serta penerimaan peserta didik baru agar dapat terlaksana tanpa adanya risiko yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik maupun pendidik.

Sejak pertama kali kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia pada Maret 2020, peserta didik diminta untuk mengikuti proses belajar mengajar melalui pembelajaran jarak jauh (Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020). Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai kurang efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, tidak hanya di Indonesia, menurunnya efektifitas PJJ juga terjadi di seluruh dunia (Kompas, 2021). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal tersebut salah satunya disebabkan karena minimnya konektivitas internet serta tidak adanya perangkat gawai untuk belajar secara *online*. Untuk mengantisipasi kondisi pandemi, pemerintah telah mengambil kebijakan terkait ketentuan penilaian serta kelulusan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.

Pembangunan Pendidikan, Kini dan Nanti

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu bidang ini menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*), tepatnya pada tujuan ke-4 yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020-2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Salah satu tantangan dalam pembangunan pendidikan sebagaimana yang diulas dalam narasi RPJMN 2020-2024 adalah adanya revolusi industri 4.0. Semakin berkembangnya teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam membantu proses pembangunan di bidang pendidikan yaitu melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*).

Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pembangunan

Pendidikan dan pembangunan berada dalam suatu proses yang saling mengisi. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Parameter dari keberhasilan suatu sistem pendidikan adalah dengan melihat hasil

capaian pendidikan. Hal ini juga menjadi satu cara untuk memprediksi masa depan bangsa.

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia.

Informasi tersebut digambarkan melalui berbagai macam indikator yang berkaitan dengan capaian pembangunan di bidang pendidikan dan disajikan dalam bentuk buku publikasi “Statistik Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu 2021”. Publikasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021.

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021 serta data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021. Data-data yang disajikan didisagregasi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin sehingga diharapkan mampu menggambarkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sistematika Penulisan

Secara sistematis Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 disajikan dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan, yang menceritakan bagaimana gambaran pendidikan di masa pandemi, pembangunan pendidikan saat ini dan nanti, pentingnya data pendidikan sebagai monitoring pembangunan, serta sistematika penulisan dari publikasi.

Bab II

Metodologi, memaparkan sumber data serta konsep dan definisi.

Bab III

Sarana dan Prasarana Pendidikan, memaparkan jumlah sekolah, peserta didik, guru, serta rasio guru dan murid.

Bab IV

Partisipasi Sekolah, yaitu menampilkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Bab V

Hasil dan Capaian Proses Pendidikan, menjelaskan Angka Melek Huruf, Kemampuan Membaca dan Menulis, dan Tingkat Pendidikan.

Selain itu, pada akhir bab juga akan disajikan hasil penghitungan *sampling error* guna melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel. Sementara penjelasan mengenai konsep definisi disajikan dalam catatan teknis.

BAB

2

METODOLOGI

Metodologi

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 ini adalah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2019 sampai dengan 2021. Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas bila dibandingkan dengan survei-survei yang lain. Di dalam Susenas mencakup banyak data yang di antaranya adalah data pendidikan. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan data pendidikan lainnya, beberapa data diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi diperlukan untuk menghindari cara pandang, persepsi maupun anggapan yang berbeda. Adapun konsep definisi yang digunakan dalam indikator pendidikan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bersekolah, adalah mendapat pendidikan atau pengajaran di sekolah. Dikatakan bersekolah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar, baik di suatu jenjang formal maupun non formal (program kesetaraan Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun kementerian lainnya.
- b. Umur, adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan.
- c. Tidak/Belum pernah bersekolah, adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, termasuk juga yang tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
- d. Masih bersekolah, adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, yang berada di bawah pengawasan

Kemendikbud maupun kementerian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah maupun institusi swasta. Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

- e. Tidak bersekolah lagi, adalah anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (di bawah pengawasan Kemendikbud maupun kementerian lainnya), yang pada saat pendataan/survei sudah tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
- f. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi (PT).
- g. Pendidikan Non Formal, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C).
- h. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal dan non formal.
- i. Angka Melek Huruf (AMH), adalah proporsi penduduk usia tertentu yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya, terhadap kelompok penduduk usia tertentu. Angka ini digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai di suatu daerah, karena melek huruf (membaca dan menulis) merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$AMH = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia tertentu yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Banyaknya penduduk usia tertentu}} \times 100$$

- j. Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia jenjang tertentu. APK ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APK = \frac{\text{Banyaknya penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- j. Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah proporsi dari semua anak pada suatu kelompok umur tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS ini bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APS = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- i. Angka Partisipasi Murni (APM), adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APM = \frac{\text{Banyaknya pddk usia sekolah tertentu yg sekolah pada jenjang yg sesuai}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- m. Rata-rata Lama Sekolah, adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Proses penghitungannya menggunakan tiga variabel simultan, yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, jenjang pendidikan yang ditamatkan, dan ijazah tertinggi yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang yang ditamatkan.
- n. Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- o. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
- SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
 - SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.
 - SM/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.
 - PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2, S3 dan sederajat.

BAB

3

**SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN**

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian dari standar pendidikan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003, bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tanpa ada kendala. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

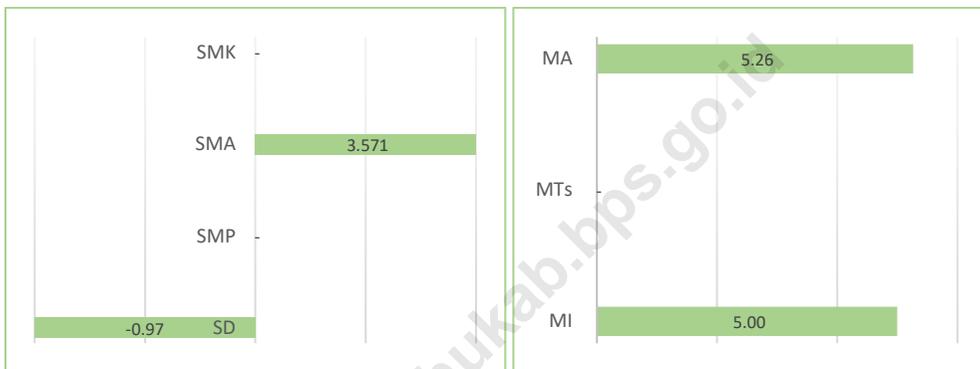
Jumlah Sekolah dan Peserta Didik

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi semua bidang pendidikan, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu bidang yang sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Bagaimana tidak, sekolah-sekolah harus ditutup demi mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali. Proses pembelajaran berubah menjadi belajar dari rumah (BDR) yang tentu sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka.

Pemerintah lebih memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat dengan mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi. Pada masa akademik baru atau semester ganjil, satuan pendidikan yang berada di zona kuning, orange, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk daerah zona hijau, diterapkan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara ketat dengan persyaratan berlapis. Kemudian pada semester genap, peraturan tersebut sedikit melonggar dengan diizinkannya daerah zona kuning untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti halnya di daerah zona

hijau. Namun, walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, masih banyak satuan pendidikan yang tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Pemerintah perlu memastikan kesiapan pendidikan dalam menerapkan kenormalan baru, baik dari segi sumber daya maupun sarana dan prasarana sekolah.

Gambar 1.
Pertumbuhan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2022, diolah

Secara umum, pada tahun 2020/2021 jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan mengalami penambahan, kecuali jumlah sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) mengalami penurunan sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1. Penambahan jumlah sekolah paling besar terjadi pada jenjang Pendidikan Madrasah Aliyah (MA).

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga swasta dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Gambar 2 memperlihatkan kontribusi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu. Terlihat bahwa penyelenggara pendidikan pada jenjang SMK dan MTs lebih banyak dari pihak swasta. Pada gambar tersebut jumlah sekolah dibawah wewenang Kemendikbud terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar kontribusi pihak swasta dalam penyediaan bangunan sekolah. Tapi, hal tersebut tidak berlaku untuk jumlah sekolah yang berada di bawah wewenang Kemenag.

Gambar 2.
Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2022, diolah

Jumlah peserta didik berdasarkan jenjang seperti piramida terbalik, jumlah peserta didik akan semakin menurun seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan seperti yang tertera pada Tabel 1. Hal ini disebabkan oleh program wajib belajar 9 (sembilan) tahun pemerintah. Pada tahun ajaran 2020/2021, minat siswa SMP dalam melanjutkan pendidikan di SMK sedikit mengalami kenaikan. Jumlah peserta didik dibawah wewenang Kemendikbud menunjukkan bahwa penambahan peserta didik pada jenjang SMA lebih banyak dibandingkan penambahan peserta didik SMK. Dapat dicermati juga bahwa bertambahnya jumlah sekolah SMA, jumlah peserta didik pada tahun ajaran tersebut juga mengalami peningkatan.

Tabel 1.
Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran	
	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)
Sekolah Dasar	58 903	57 757
Sekolah Menengah Pertama	19 038	18 994
Sekolah Menengah Atas	8 696	9 336
Sekolah Menengah Kejuruan	7 957	8 007

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2020-2022

Tabel 2.
Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, MA) dan Status Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran	
	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)
Madrasah Ibtidaiyah	58 903	57 757
Madrasah Tsanawiyah	19 038	18 994
Madrasah Aliyah	8 696	9 336

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2020-2022

Sama halnya dengan Tabel 1, Tabel 2 juga menunjukkan bahwa jumlah peserta didik dibawah Kemenag seperti piramida terbalik, dimana semakin tinggi jenjang pendidikannya maka semakin sedikit pula jumlah peserta didiknya. Namun pada tahun ajaran 2020/2021 berkurangnya peminatan peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah, walaupun pada jenjang Pendidikan dibawahnya yakni peminatan peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke Madrasah Tsanawiyah mengalami peningkatan. Dapat dicermati juga bahwa, dengan penambahan sekolah

Madrasah Aliyah pada tahun ajaran 2020/2021 tidak menjamin pula penambahan peminatan peserta didik pada jenjang Pendidikan tersebut.

Gambar 3.
Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2022, diolah

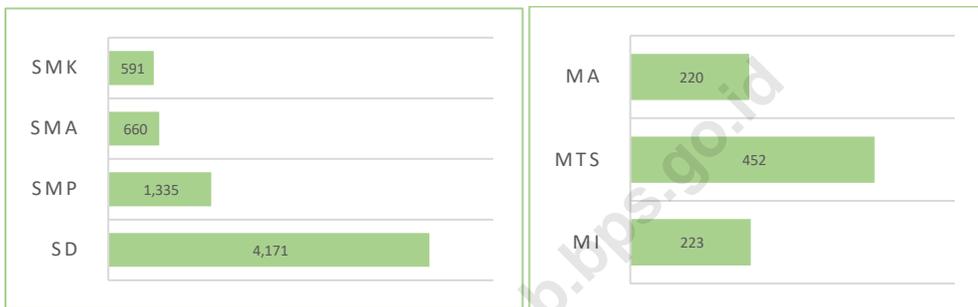
Sekolah negeri memang sudah sejak lama diminati daripada sekolah swasta. Peserta didik yang masuk ke sekolah swasta biasanya adalah peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri kemudian mendaftar di sekolah swasta. Preferensi secara umum masyarakat ini tentu disebabkan oleh biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua lebih murah jika menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Berdasarkan Gambar 3, jumlah peserta didik di sekolah negeri dan swasta sejalan dengan jumlah sekolah di setiap jenjangnya.

Beban Kerja Pendidik

Satu hal lagi yang memegang peranan yang sangat krusial dalam kegiatan belajar mengajar adalah tersedianya guru/tenaga pendidik karena seorang guru adalah kunci pendidikan. Urgensi keberadaan guru tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 78 dan didukung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Berdasarkan UU dan Kepres tersebut, keberadaan guru di setiap sistem pendidikan Indonesia menjadi krusial, karenanya perlu ada batasan jumlah tertentu di mana guru dapat membimbing peserta didiknya di setiap kelas atau rombongan belajar.

Hal tersebut dapat menunjang efektivitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa jumlah guru berbanding lurus dengan jumlah sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin banyak sekolah, keberadaan guru juga semakin banyak.

Gambar 4.
Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2022, diolah

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru. Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah.

Tabel 3.
Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran	
	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)
Sekolah Dasar	15	14
Sekolah Menengah Pertama	15	14
Sekolah Menengah Atas	14	14
Sekolah Menengah Kejuruan	14	14

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2020-2022, Diolah

Tabel 4.
Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, dan MA) dan Status Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran	
	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)
Madrasah Ibtidaiyah	16	17
Madrasah Tsanawiyah	13	14
Madrasah Aliyah	11	13

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2020-2022, Diolah

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 Rasio Murid per Gurunya masih dibawah 20 murid, yang mengindikasikan bahwa rasio murid per guru di Kabupaten Indragiri Hulu masih ideal. Namun ada hal menarik dari Tabel 4, yakni

rasio murid per gurunya mengalami kenaikan, yang artinya beban guru untuk mendidik peserta didik/murid bertambah. Sedangkan jumlah guru dari tahun ajaran 2019/2020 ke 2020/2021 juga meningkat yang mengindikasikan bahwa penambahan jumlah murid lebih banyak dibanding penambahan jumlah guru pada sekolah yang berada di bawah wewenang Kemenag.

Rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Rasio murid-guru yang ideal akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas tentunya akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar di kelas, tapi bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan karena guru yang lebih terampil dan berpengalaman, misalnya, mungkin bisa menangani kelas yang lebih besar daripada yang kurang berpengalaman.

BAB | 4

PARTISIPASI SEKOLAH

Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28c dan 31. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah yang merupakan hak setiap kalangan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, termasuk juga penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan keempat SDGs menjamin kualitas pendidikan inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

COVID-19 telah menghantam stabilitas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek pendidikan. Pengalihan metode pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi metode daring menyulitkan sejumlah kalangan. Efektivitas yang diragukan dari pembelajaran daring membuat sebagian orang menyerah dan akhirnya melepas bangku sekolah. Jika dalam kondisi normal saja *gap* kesempatan bersekolah antarkelompok besar, tentunya kondisi pandemi ini akan semakin mempersulit kelompok *vulnerable* dalam mengakses pendidikan.

Indikator partisipasi sekolah selain digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah diberikan pemerintah, juga untuk melihat apakah target yang ditetapkan pemerintah tercapai. Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat, yang artinya semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2019-2021 memperlihatkan hasil penghitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Partisipasi Sekolah

Manusia merupakan modal utama pembangunan. Oleh karenanya, berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu bentuk peningkatan kualitas dan pemanfaatan fasilitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah.

Partisipasi sekolah diukur melalui tiga indikator, yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Masing-masing indikator memiliki esensi berbeda. APS menitikberatkan pada partisipasi anak usia sekolah, sedangkan APK dan APM memberikan fokus cakupan partisipasi sekolah dari sudut pandang jenjang pendidikan. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Tabel 5.
Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021

Partisipasi Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,91	0,00	0,46
Masih Bersekolah SD/Sederajat	36,60	38,39	37,49
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	14,48	14,61	14,74
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	18,67	18,59	18,63
Tidak Bersekolah Lagi	28,95	28,41	28,64

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pada Tabel 5 di atas terlihat bahwa di tahun 2021 persentase penduduk 7-24 tahun yang belum/tidak pernah bersekolah sebesar 0,46 persen, yang masih bersekolah sebesar 70,86 persen dan tidak bersekolah lagi sebesar 28,64 persen. Artinya, sebanyak 70 hingga 71 dari 100 penduduk Kabupaten Indragiri Hulu usia 7-24 tahun masih bersekolah. Sementara terdapat 28 hingga 29 dari 100 penduduk Kabupaten Indragiri Hulu usia 7-24 tahun tidak bersekolah lagi dan sisanya tidak/belum pernah bersekolah.

Menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan Kabupaten Indragiri Hulu usia 7-24 tahun yang masih bersekolah lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Persentase penduduk tidak/belum pernah bersekolah dan penduduk tidak

bersekolah lagi turun dari tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa partisipasi untuk bersekolah di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2020 mengalami peningkatan dari 68,93 persen menjadi 70,86 persen.

Keberhasilan pendidikan di suatu bangsa akan menciptakan sumber daya manusia unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi yang pada akhirnya menjadi generasi harapan bangsa, *engine of growth*, dan lokomotif pembangunan. Di sinilah peran penting penduduk usia sekolah 7-24 tahun diperlukan karena mereka menjadi bagian dari komposisi penduduk yang akan memanfaatkan peluang tersebut mengingat usia 7-24 tahun merupakan rentang usia sekolah, dimana hendaknya mereka yang berada pada rentang usia tersebut masih aktif dalam mengenyam pendidikan di bangku sekolah tanpa terkecuali.

Angka Partipasi Sekolah

Angka Partipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar kesempatan individu memperoleh pendidikan. APS dibedakan menurut kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan. Indikator ini tidak mempertimbangkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh individu.

Nilai Angka Partipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu. APS yang tinggi juga menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 6.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2020-2021

Kelompok Umur	2020	2021		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)		(2)	(3)	(4)
7 - 12 Tahun	99,03	99,09	100,00	99,54
13 - 15 Tahun	94,82	90,38	100,00	95,07
16 - 18 Tahun	73,46	73,26	74,48	73,84

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2021

Tabel 6 menunjukkan bahwa tahun 2021 APS terbesar terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun, yaitu sebanyak 99,54 persen. Artinya, hampir seluruh anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Indragiri Hulu bersekolah pada tahun 2021. Dari tabel tersebut juga bisa diketahui bahwa nilai APS berkonsentrasi di kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, dan nilainya semakin rendah seiring meningkatnya usia kelompok umur. Pada umumnya orang tua selalu mengusahakan anaknya untuk mengecap pendidikan dasar sehingga peluang kelompok umur 7-12 tahun untuk mengakses pendidikan lebih tinggi dibanding kelompok umur 13-15 tahun.

Menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan lebih tinggi dibanding dengan APS penduduk laki-laki untuk semua kelompok umur. Namun, seiring bertambahnya usia perbedaan APS penduduk perempuan dan penduduk laki-laki semakin besar pada kelompok umur 7-12 tahun dan kelompok umur 13-15 tahun. Artinya, semakin meningkatnya usia semakin tinggi kesenjangan partisipasi sekolah antara penduduk perempuan dan laki-laki di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun untuk kelompok umur 16-18 tahun APS laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama dalam mengecap pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Angka Partisipasi Kasar

Kecerdasan anak berkembang sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu (UNESCO, 2009). Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena adanya peserta didik di atas dan di bawah umur sebagai indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas. Seperti adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan, terutama melihat kesuksesan program wajib belajar.

Fase perkembangan tersebut berkenaan dengan usia anak memasuki sekolah dasar yang merupakan fase awal dari seluruh jenjang pendidikan yang ditempuh. Tahapan ini menjadi sangat penting karena pada masa tersebut anak akan belajar mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka terkait minat, bakat, akademis, dan juga karakter yang akan terus dibawa hingga memasuki tingkat pendidikan selanjutnya. Jika pondasi awal pendidikan telah dibangun dengan baik, maka anak tinggal melanjutkan apa yang telah mereka kembangkan sebelumnya dengan lebih baik lagi untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sudah selayaknya persentase mereka yang mengenyam pendidikan pada jenjang SD/ sederajat tersebut cenderung tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini tergambar melalui nilai APK SD/ sederajat.

APK untuk SD/ Sederajat adalah 107,16 persen, APK SMP/ Sederajat sebesar 82,49 persen dan APK SMA/ Sederajat sebesar 85,29 persen. APK pada jenjang pendidikan SD/ sederajat melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia

anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar range 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang masih bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia SD (7-12 tahun). Hal ini menunjukkan indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah serta angka mengulang kelas yang tinggi. APK jenjang pendidikan SD/Sederajat sampai SMA/Sederajat bisa dilihat pada Tabel 7 dibawah.

Tabel 7.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat	107,32	106,99	107,16
SMP/Sederajat	81,89	83,12	82,49
SMA/Sederajat	87,78	82,52	85,29

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pendidikan bukan hanya milik laki-laki, perempuan pun memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Diskriminasi gender dalam memperoleh pendidikan di masa kini sudah lebih sedikit dibanding yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Bahkan terdapat hal yang menarik dari APK perempuan dan APK laki-laki di Kabupaten Indragiri Hulu seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7 di atas. Nilai APK perempuan lebih tinggi dibandingkan APK laki-laki di jenjang pendidikan SMP/Sederajat, dan APK laki-laki lebih besar pada jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SMA/Sederajat.

Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, nilai APK perempuan dan APK laki-laki sama-sama berada di atas 100 dengan nilai APK laki-laki yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada penduduk laki-laki terdapat indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas yang lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Angka Partisipasi Murni

Indikator lain yang dihasilkan dalam publikasi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Angka Partisipasi Murni (APM) bertujuan untuk mengukur sejauh mana cakupan jenjang pendidikan tertentu bagi individu kelompok usia sekolah yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu, yaitu jenjang SD/Sederajat (7-12 tahun), SMP/Sederajat (13-15 tahun), dan SMA/Sederajat (16-18 tahun). Untuk jenjang pendidikan tinggi, indikator APM kurang tepat digunakan karena besarnya variasi durasi program pendidikan (UNESCO, 2009).

Tabel 8.

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat	97,63	99,32	98,47
SMP/Sederajat	72,38	81,70	76,92
SMA/Sederajat	58,95	58,75	58,85

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Dapat dilihat pada Tabel 8 bahwa pola APM memiliki kemiripan dengan pola APK, APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 98,47 persen kemudian semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan gender, APM untuk setiap jenjang pendidikan tidak memiliki perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan, bahkan APM perempuan cenderung sedikit lebih tinggi

dibanding APM laki-laki. Namun, pada jenjang SMA/Sederajat, APM perempuan sedikit lebih rendah dibanding APM laki-laki.

Sesuai prinsip fundamental dan pengarusutamaan gender yang diusung dalam target pencapaian SDGs 2030, kesetaraan gender juga diperlukan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan dasar. Rasio APM digunakan untuk melihat apakah pencapaian kesetaraan gender dalam aspek pendidikan telah terpenuhi atau belum. Rasio APM merupakan persentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. Nilai rasio APM sebesar 100 persen menunjukkan APM perempuan sama dengan APM laki-laki, artinya kesetaraan gender sudah terwujud.

Gambar 5.
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 5 memperlihatkan rasio APM pada masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu. Rasio APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat, yaitu sebesar 99,66 persen. Selain jenjang SMA/Sederajat, semua nilai rasio APM sudah mencapai angka 100 persen. Artinya adalah persentase penduduk perempuan yang bersekolah tepat waktu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Angka rasio APM paling tinggi untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat yang mencapai 112,88 persen. Kecenderungan penduduk laki-laki untuk lebih memilih meninggalkan bangku sekolah ketika menginjak usia remaja

mungkin dapat menjadi faktor penyebab, tapi tentu masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

<https://inhukab.bps.go.id>

BAB

5

**HASIL & CAPAIAN
PROSES PENDIDIKAN**

Hasil dan Capaian Proses Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berperan sebagai katalisator pembangunan. Tujuan pembangunan pendidikan dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua diharapkan dapat tercapai.

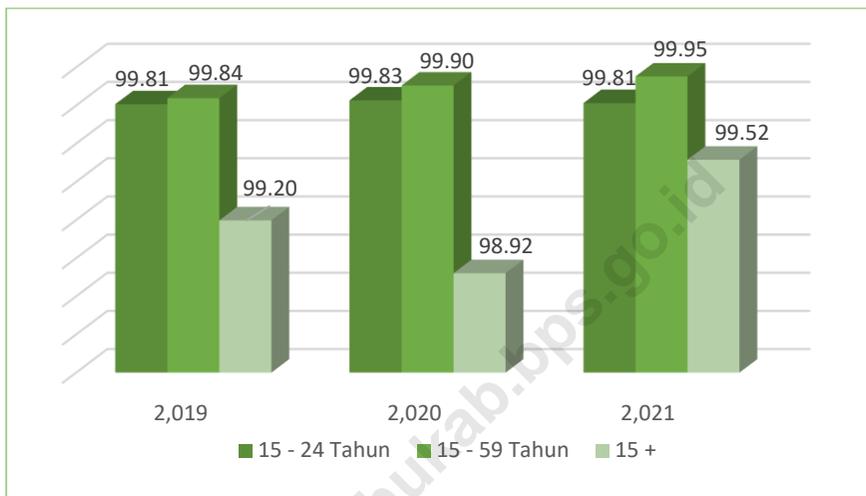
Bab ini mengulas beberapa capaian pembangunan pendidikan melalui indikator pendidikan yang bersumber dari Susenas 2019-2021. Capaian pendidikan dapat ditinjau dari Angka Melek Huruf (AMH) penduduk kelompok umur muda dan dewasa, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, dan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf (AMH)

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya dan berujung pada peningkatan kualitas hidup diri, keluarga bahkan negaranya di berbagai bidang kehidupan. Indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). Sejak 10 tahun terakhir, AMH digunakan sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa

tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Gambar 6.
Angka Melek Huruf di Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Kelompok Umur 2019-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Dari Gambar 6 dapat diketahui capaian AMH usia 15 tahun keatas mengalami fluktuatif. Sedangkan untuk usia 15-24 tahun cenderung stagnan di angka 99,8 persen dan usia 15-59 tahun terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan 2021, namun peningkatannya dapat dikatakan lambat bahkan cenderung stagnan karena angkatnya sudah mencapai hampir 100 persen. Apabila dibandingkan capaian AMH untuk setiap kelompok umur, AMH usia 15 tahun keatas lebih rendah dibanding AMH usia 15-24 tahun dan AMH usia 15-59 tahun. Pada tahun 2021, AMH usia 15-24 tahun dan AMH usia 15-59 tahun di Kabupaten Indragiri Hulu masing-masing mencapai 99,81 persen dan 99,95 persen. Sedangkan AMH usia 15 tahun keatas sebesar 99,52 persen. Hal ini disebabkan karena pada kelompok umur 15 tahun keatas juga mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa. Selain itu, program keaksaraan fungsional juga hanya dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun.

Tabel 9.
Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(8)	(9)	(10)
15 - 24 Tahun	99,63	100,00	99,81
15 - 59 Tahun	99,91	100,00	99,95
15 +	99,77	99,25	99,52

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Merujuk pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa dari jenis kelamin, capaian AMH 15 tahun keatas penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (99,25 persen dibandingkan 99,77 persen). Hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam memacu peningkatan AMH kelompok umur 15 tahun keatas yakni penduduk perempuan. Hal ini dikarenakan kelompok penduduk tersebut memiliki AMH yang jauh lebih rendah sehingga menjadi fokus pemerintah. Namun untuk penduduk perempuan umur 15-24 tahun dan umur 15-19 tahun bisa dikatakan sudah semuanya bisa mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tahun 2021.

Tabel 10.
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021

Kemampuan Membaca dan Menulis	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	99,41	98,45	98,94
Huruf Lainnya*]	73,08	73,90	73,48

Catatan: *) Huruf lainnya yaitu selain huruf latin

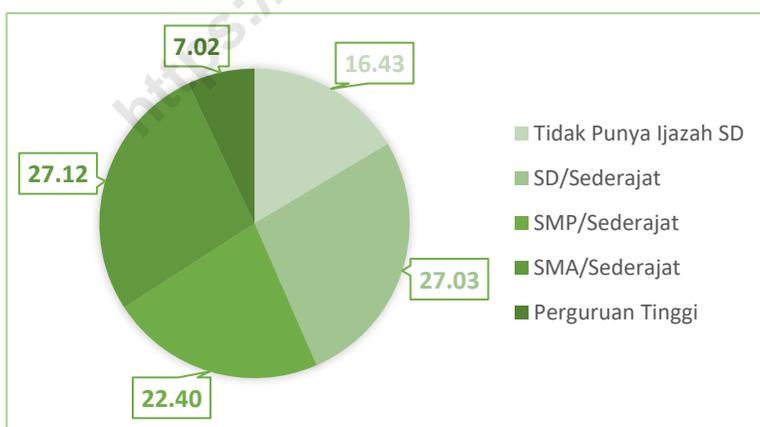
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa dominasi penduduk dapat membaca huruf latin dibandingkan huruf selain latin. Selain itu, penduduk perempuan lebih tinggi literasi membaca menulis huruf selain latin dibandingkan penduduk laki-laki. Namun, perbedaannya tidaklah begitu signifikan bahkan cenderung hampir sama antara literasi membaca dan menulis huruf selain latin penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2021.

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu umumnya hanya mencapai pendidikan menengah. Data Susenas Maret 2021 menunjukkan bahwa 27,12 persen penduduk 15 tahun ke atas tamat SMA/ sederajat dan hanya sekitar 7,02 persen penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi.

Gambar 7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pada Gambar 7 dapat juga dilihat bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat SMP sederajat sebesar 22,40 persen, dan tamat SD sederajat sebesar 27,03 persen. Sedangkan penduduk yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan SD masih sebesar 16,43 persen. Sementara itu,

masih ada penduduk yang tidak pernah bersekolah ataupun penduduk yang belum bersekolah pada umur 5 tahun ke atas yaitu sebesar 4,77 persen. Sebagaimana tujuan pembangunan pendidikan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, maka pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Salah satunya pemerintah juga harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik dan ekonomi.

Tabel 11.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah SD	14,01	18,95	16,43
SD/Sederajat	27,02	27,04	27,03
SMP/Sederajat	23,76	20,99	22,40
SMA/Sederajat	28,85	25,30	27,12
Perguruan Tinggi	6,35	7,71	7,02

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Jika dilihat dari jenis kelamin, yang bertahan sampai menyelesaikan perguruan tinggi adalah penduduk perempuan. Terlihat dari Tabel 11 yang mempunyai ijazah SMA Sederajat penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan, namun untuk sampai ke jenjang perguruan tinggi, persentase perempuan menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki.

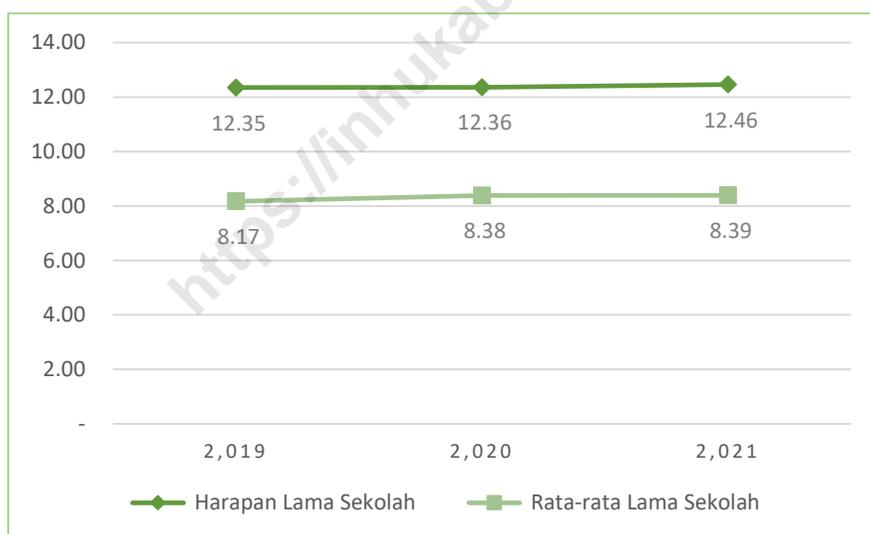
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang

pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menempuh pendidikan formal. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sampai sejauh mana kemampuan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan juga dapat dilihat melalui indikator ini.

Gambar 8. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indragiri Hulu, 2019-2021



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Manusia dan Gender Provinsi Riau 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 8, Harapan Lama Sekolah dari tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,06. Capaian HLS di tahun 2021 adalah sebesar 12,46 tahun. Artinya, lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun di Kabupaten Indragiri Hulu adalah selama 12 sampai 13 tahun, atau setara dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Peningkatan setiap tahunnya juga terjadi pada RLS, berkisar antara 0,01 sampai 0,21 tahun. Capaian RLS di tahun 2021 sebesar 8,31 tahun. Artinya, rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hulu dalam menempuh pendidikan formal adalah 8,31 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP/ sederajat. Meskipun masih jauh dari HLS peningkatan dan capaian ini menunjukkan bahwa perkembangan RLS di Kabupaten Indragiri Hulu termasuk percepatan di tahun 2019 -2020, peningkatan RLS dari tahun 2020-2021 tidak secepat tahun sebelumnya.

<https://inhukab.bps.go.id>

BAB

6

**HASIL PENGHITUNGAN
SAMPLING ERROR**

Hasil Penghitungan *Sampling Error*

Estimasi dari sampel survei dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *sampling error* dan *non-sampling error* (seperti kesalahan dalam wawancara dan kesalahan pengolahan). *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* dari suatu angka estimasi persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2019-2021. Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

Standard error juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

RSE \leq 25% dianggap **akurat**

RSE $>$ 25% tetapi \leq 50% perlu **hati-hati** jika ingin digunakan

RSE $>$ 50% maka nilai estimasi tersebut dianggap **sangat tidak akurat**

Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan menggabungkan estimasi tersebut dengan estimasi lain untuk mendapatkan nilai estimasi yang RSE-nya lebih kecil.

Tabel 1.

Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2021

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Punya Ijazah SD	16,43	1,33	8,12	13,81	19,04
SD/Sederajat	27,03	1,32	4,90	24,44	29,63
SMP/Sederajat	22,40	1,11	4,95	20,23	24,58
SMA/Sederajat dan ke Atas	27,11	1,29	4,76	24,58	29,65
Perguruan Tinggi	7,02	0,83	11,87	5,39	8,66

Daftar Pustaka

Bappenas (2020). METADATA INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA.

Kemendikbud. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021, 5 Januari. Kemendikbud Sampaikan Capaian Tahun 2020 dan Sasaran Tahun 2021. Diakses pada 15 November 2021, dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/kemendikbudsampaikan-capaian-tahun-2020-dan-sasaran-tahun-2021>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu 2021*. Rengat: BPS Kabupaten Indragiri Hulu.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2020*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik, 2021. Indeks Pembangunan Manusia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. Rasio Murid-Guru. Sirusa BPS. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/128>

Badan Pusat Statistik. Angka Partisipasi Sekolah. Sirusa BPS. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1175>

Badan Pusat Statistik. Angka Partisipasi Murni. Sirusa BPS.
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/457>

Badan Pusat Statistik. Angka Partisipasi Kasar. Sirusa BPS.
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1177>

Badan Pusat Statistik. Angka Partisipasi Kasar. Sirusa BPS.
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1177>

Badan Pusat Statistik. Angka Melek Huruf. Sirusa BPS.
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/313>

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Jl. Batu Canai No 9, Pematang Reba, Rengat Barat 29351

Website: <https://inhukab.bps.go.id> Email: bps1402@bps.go.id